

**PERISTIWA CHINESE TROUBELLEN DI BATAVIA:
 SEBUAH TINJAUAN SEJARAH HUKUM**

Oleh: Fokky Fuad*

ABSTRACT

This study aimed to describe the genocide descriptively Chinese in Batavia that occurred in October 1740. Event known as Chinatown Chinese troubelen or commotion, is the first step of ethnic segregation in Indonesia are carried out systematically by the Trade Union of the East Indies Company (VOC). Ethnic Chinese were targeted over policy administration errors VOC in Batavia, where they need to create a tangible goal that can be used as a scapegoat of the various errors. Thus, VOCs can avoid accusations of failure of the administration

Key Words: Chinese, ethnic cleansing, VOC administration.

Latar Belakang

Kerusuhan antar etnik di Indonesia yang melibatkan etnik Cina tidak saja telah menyulut hubungan inharmonis antara beragam etnik di Indonesia. Peristiwa kerusuhan etnik di Jakarta pada tahun 1998 memiliki beberapa kesamaan dengan peristiwa serupa pada tahun 1740 di Batavia. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari adanya kegagalan pemerintah dalam mengatur dan mengembangkan hubungan antar etnik di Nusantara, serta adanya upaya pelimpahan kesalahan kepada pihak yang dapat dijadikan kambing hitam. Peristiwa pembantaian etnik Cina yang terjadi pada Tahun 1740 mengorbankan setidaknya 10.000 (sepuluhribu) jiwa masyarakat etnik Cina di Batavia.

Hubungan antar etnis dalam kajian budaya dan sejarah hukum menjadi menarik untuk dikaji setidaknya dengan

beberapa alasan. Pertama, bahwa hubungan-hubungan antar etnis di Indonesia dalam tataran hukum perlu diatur sebagai bentuk dari pengendalian etnis-etnis tertentu untuk mempermudah penguasa melancarkan berbagai program kebijakan di kalangan penduduk. Kedua, dalam keadaan tertentu aturan hukum yang cenderung menyamaratakan kebutuhan melalui hukum atas beragam etnis yang berbeda di Indonesia mewarisi atas apa yang telah terjadi pada masa VOC lalu. Dengan demikian bagaimanakah hukum setidaknya mampu memberikan rasa keadilan dari berbagai kebutuhan yang berbeda?

Peristiwa Pendahuluan

Masyarakat Cina di Indonesia terbagi atas dua kelompok besar: Cina *Singkeh*, yaitu masyarakat Cina yang baru saja

* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi antropologi hukum

mendarat di Indonesia yang pada umumnya mereka sangat miskin. Kelompok kedua adalah *Laukeh* yaitu masyarakat Cina yang telah bertempat tinggal selama sepuluh sampai dua puluh tahun dan disebut dengan *Peranakan*, yaitu masyarakat Cina yang telah lahir di Indonesia dengan ayah atau ibu dari golongan Melayu (Clockener 2007:86).

Peristiwa pembantaian penduduk Cina di Batavia terjadi pada tahun 1740 sebagai akibat dari buruknya sistem pengelolaan pemerintahan VOC pada saat itu. VOC menempatkan penduduk Cina di luar kawasan tembok Kota Batavia yang disebut *ommelanden* setelah tembok kota tersebut dibangun pada tahun 1650 (Lohanda 2007:x). Keuntungan dilakukannya kebijakan ini adalah: Pertama, lokasi pemukiman di luar tembok kota dijadikan wilayah penyangga keamanan di sekeliling tembok kota; Kedua, penduduk tersebut diijinkan untuk mengusahakan pertanian-perkebunan di wilayah pemukiman mereka, agar warga kelompok ini swasembada. Dengan cara ini pemerintah VOC tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penjagaan keamanan di sekitar Batavia, sementara keamanan dalam tembok kota yang didiami oleh warga kulit putih ditangani oleh pasukan *schutterij* (Lohanda 2007:xi). Masyarakat Cina yang tinggal di luar Benteng Kota Batavia berbeda dengan masyarakat yang tinggal di

dalam kota Batavia. Masyarakat Cina yang di luar tembok kota sulit dikontrol, berada di luar jangkauan pemerintahan VOC, karena tidak terdapat organisasi masyarakat Cina seperti di Batavia (Benny t.t:108).

Warga Cina pada masa itu dikepalai oleh seorang Kapitan Cina dimana ia bertugas untuk memungut pajak bagi VOC. Masyarakat Cina adalah masyarakat yang cinta damai, dan pada umumnya masyarakat Cina yang tinggal di luar tembok Kota Batavia hidup sebagai petani atau menjadi kuli perkebunan gula. Hoetink (2007:9) menggambarkan dalam tulisannya:

“Di oedik-oedik Betawi itoe waktu boleh jadi betoel ada mengoembara orang-orang Tionghoa jang tida baik. Aken tetapi bagian jang paling besar dari orang-orang Tionghoa jang tinggal disana sebagi orang tani atawa sebagi koeli-koeli dalem penggilingan teboe tentoelah tida harep laen daripada bisa lakoeken pekerdjaannja dengan aman dan sentosa”

Masyarakat Cina yang masuk ke Batavia sebagian besar bekerja pada pabrik-pabrik gula yang umumnya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Cina kaya. Pada tahun 1710 terdapat 130 (seratus tiga puluh) pabrik gula milik 84 (delapan puluh empat) pengusaha dimana 79 (tujuh puluh sembilan) diantaranya adalah pengusaha Cina (Lohanda 2007:11).

Masyarakat Cina yang datang ke Indonesia khususnya Batavia semakin lama semakin banyak, sehingga dianggap akan menimbulkan bahaya kuning, sebuah istilah tentang banyaknya orang Cina. Banyaknya masyarakat Cina tersebut menimbulkan niat VOC untuk memberlakukan surat izin tinggal. Syarat pemilikan izin tersebut menjadi ajang pemerasan oleh pejabat-pejabat VOC. Hal itu kemudian menjadi beban dan tekanan bagi masyarakat Cina (Clockener 2007:86-87). Surat izin yang diberlakukan tersebut merupakan respon atas banyaknya pendatang Cina tak berizin yang menjadi tenaga kerja illegal di Batavia (Lohanda 2007:11).

Surat izin yang diberlakukan kepada masyarakat Cina di Batavia oleh VOC sangat beragam. *Permissie briefje* (surat izin tinggal) bagi mereka yang telah bertempat tinggal di Batavia lebih dari 10 (sepuluh) tahun khususnya (diterapkan pada tanggal 10 Juni 1727) *licentie briefje* bagi masyarakat Cina yang bertempat tinggal 3 (tiga) bulan untuk urusan niaga, dengan membayar 2 *riksdalders* (diterapkan pada tanggal 12 Juni 1727). Bagi yang akan pulang ke Tiongkok dan berniat kembali ke Batavia juga wajib mendapatkan izin (diterapkan pada tanggal 10 Juni 1727) (Lohanda 2007:11).

Masyarakat Cina di luar tembok kota Batavia sering mengalami penangkapan,

pemerasan, dan intimidasi dari pejabat-pejabat VOC (Hoetink 2007:7-9):

“penangkepan itoe tida patoet adanja dan itoe orang-orang djadi keilangan dalem satoe saat miliknja jang marika telah tjari dalem tempo banjak taon, milik mana diperes dari marika oleh orang-orangnja Commisaris oeroesan orang Boemipoetra jang tambahan lagi tida segan aken bikin roesak kehormatannja marika poenja anak istri .Djoega pemerasan dan siksaan-siksaan oleh itoe Commisaris dan penggawe-penggawenja boleh jadi marika telah terima sadja, tjoba tida.”

Beban masyarakat Cina ini menjadi sangat berat ketika banyak pengangguran akibat bangkrutnya pabrik-pabrik gula. Pabrik gula banyak yang mengalami kebangkrutan karena menurunnya permintaan pasar Eropa terhadap gula. Pengangguran masyarakat Cina meningkat dan banyak dari mereka yang terbelit hutang yang bertumpuk. Akhirnya banyak diantara mereka menjadi perampok (Blusse 2004:170-171).

Penderitaan masyarakat Cina tersebut semakin bertambah ketika mereka tidak dapat mengadukan penderitaan tersebut kepada pejabat yang pemerintah yang berwenang. Hoetink (2007:8) menggambarkan:

“pengadoean-pengadoean tentang kelakoeannja itoe Commisaris jang biasanja ada orang jang disajang oleh Gouverneur Generaal boleh jadi telah tida berhasil. Lagipoen pada siapa jang orang koerang senang moesti madjoeken pengadoean-

pengadoeannja? Di oedik-oedik Betawi tida ada bestuur, ambtenaar-ambtenaar, atawa kepala-kepala, pada siapa orang-orang Tionghoa jang diperlakoeken tida patoet bisa sampeken pengadoeannja, tida ada ditaroh di oedik-oedik betawi.”

Surat izin yang diberlakukan oleh VOC terhadap masyarakat Cina di Batavia ternyata diperjualbelikan oleh pejabat pemerintahan VOC, sedangkan bagi orang Cina yang tidak memiliki surat izin tinggal di Batavia akan dideportasi ke Ceylon (Srilanka), sehingga pada akhirnya menimbulkan pemberontakan dari penduduk Cina di Batavia (Hoetink 2007:9):

“tentang itoe pembrontakan dari orang-orang tionghoa ada ternjata terang, sebab-sebab jang benar dari itoe pembrontakan jalah pertambahan jang leoar biasa besar dari djoemblahnja orang Tionghoa dan pemerasan, teroetama soerat-soerat permisi aken tinggal di Betawi dan perboeatan-perboeatan kedji serta pemerasan waktoe menangkep orang-orang tionghoa jang aken dikirim ke Ceylon.”

Beberapa orang Cina kemudian menghasut kawan-kawannya untuk mengadakan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan VOC. Selain itu muncul isu yang menyatakan bahwa orang-orang yang hendak dideportasi ke Ceylon tersebut tidak akan pernah sampai Ceylon (Srilanka) karena ditenggelamkan di tengah laut (Lohanda 2007:12):

“Kerna gampang pertjaja, marika telah pertjaja bahoea orang-orang Tionghoa jang ditangkep dalam perdjalananan ke Ceylon dilempar ke laoet. Pikiran bahoea marika poen bisa dapat ini nasib, ditambah dengan rasa kesian boeat sesamanja bangsa jang soeda dapet itoe nasib, telah bikin itoe rasa koerang senang djadi kemoerkaan besar, rasa takoet djadi nekat.”

Masyarakat Cina yang telah terhasut oleh adanya isu tersebut kemudian mempersenjatai diri dan bersiap melawan VOC. Melihat aksi berani dari warga etnis Tionghoa, VOC semakin menaruh rasa tidak suka terhadap warga Tionghoa sehingga peraturan terhadap mereka pun semakin diperketat. Gubernur Jenderal Valckenier kemudian menyerahkan masalah ini kepada Parlemen untuk dibahas. Berdasarkan hasil rapat Parlemen pada tanggal 25 Juli 1740 diberlakukan resolusi berupa penangkapan kepada warga etnis Tionghoa yang dianggap mencurigakan, baik kepada mereka yang telah memiliki izin tinggal maupun yang belum memiliki izin tinggal. Bagi mereka yang tidak bisa membuktikan dirinya memiliki pekerjaan yang tetap akan dibuang ke Srilangka (Lohanda 2007:12). Tindakan keras ini diberlakukan sebagai akibat dari munculnya kekhawatiran atas terulangnya peristiwa konspirasi dan pemberontakan yang dilakukan oleh Pieter Eberveld terhadap kekuasaan VOC

(Benny G. Setiono t.t:109-110; Shahab 2002:82-83).

Peristiwa Pembantaian

Masyarakat Cina kemudian mempersenjatai diri dan menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Hal tersebut tidak disadari pada awalnya oleh pemerintah VOC, mengingat tidak adanya aparat pemerintah VOC yang berada di perkampungan. Ketiadaan aparat pemerintah tersebut mengakibatkan masyarakat Cina di perkampungan Batavia segera dapat menguasai daerah di luar tembok Batavia (Hoetink 2007:10):

“Di oedik oedik Betawi ini kawan peroesoeh bisa berlakoe dengan leloeasa. Kerna disitu tida ada bestuur, maka pemerintah tida dapet taoe tentang apa jang ada terdjadi. Pemerintah baroe insaf bahaja jang mengantjem dari oedik-oedik itoe tatkala itoe gerakan berontak soeda djadi begitoe besar hingga djalannja bisa ditjegah melaenken dengan kekoeatan sendjata”

Persenjataan yang digunakan oleh masyarakat Cina ini bukan merupakan persenjataan yang baik. Walaupun persenjataan mereka kurang baik akan tetapi jumlah mereka sangat besar. Dengan jumlah yang cukup besar penduduk Cina Batavia dengan leluasa mampu menguasai kampung-kampung di Batavia serta menghancurkan pos dan tentara yang dikirim untuk menghentikan

pemberontakan. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Hoetink (2007:13):

“Orang-orang Tionghoa jang brontak betoel djoega tida bisa menoeroet prentah dan sendjatanja djelek, aken tetapi djoemblahnja ada besar sekali. Dengan leloeasa marika bisa meradjalela di oedik-oedik seraja membakar dan membinasakan. Dan, sesoeda marika rampas bebrapa post jang lemah pendjagaannja serta basmi orang-orang militair jang dikirim boeat moendoerkan marika, ia orang djadi brani boeat mnenjerang djoega pada pintoe-pintoe kota Betawi”.

Serangan yang dilancarkan oleh masyarakat Cina Batavia tersebut ternyata tidak sampai memasuki Kota Batavia karena Pemerintah VOC bertindak cepat untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Tindakan cepat pemerintah berhasil menahan masuknya pemberontak tersebut ke dalam tembok kota Batavia (Hoetink 2007:14):

“Dalem perklainan mana betoel djoega orang Tionghoa tentoe tida aken bisa menang melawan tentaranja Kompeni, tetapi toch perklainan itoe tentoe membawa kesoedahan-kesoedahan jang tjilaka djoega pendoedoek europa dalem itoe kota. Kerna pemerintah telah berlakoe awas maka tida sampe kedjadian begitoe”.

Pemberontak tersebut telah gagal memasuki Kota Batavia. Sebagai akibat dari adanya pemberontakan tersebut banyak penduduk Eropa yang bertempat tinggal di Kota Batavia meyakini bahwa

pemberontakan Cina tersebut juga mendapat dukungan dan juga persekutuan dari penduduk Cina yang berdiam di dalam Kota Batavia. Persepsi ini muncul karena masyarakat Cina merupakan masyarakat yang tidak mungkin berani melawan pemerintah, dan jika tidak ada bantuan dari masyarakat Cina yang bertempat tinggal di dalam kota maka pemberontakan itu tidak akan berhasil (Hoetink 2007:15):

“sementara itoe bisa dimengerti jang pendoedoek europa di Betawi telah pertjaja tentang adanja soeatoe persekoetoean dari pendoedoek Tionghoa. Bagi itoe pendoedoek Europa ampir tida bisa dipertjaja jang satoe bangsa, jang selalu dipandang sebagai bangsa jang paling pengetjoet dalem ini doenia, telah ada mempoenjai keberanian aken deketin kota Betawi dan menjerang pasoean-pasoean djaga di loear pintoenja itoe kota. Maka gampang sadja orang mendoega bahoea si penjerang-penjerang dari loear pertjaja pasti jang marika aken dapet bantoean dari bangsanja didalem kota, hingga didalem kota tentoe aken dilakoekan serangan, apabila serangan dari loear jang telah dipekoel moendoer dioelangkan sekali lagi”.

Kecurigaan terhadap penduduk Cina dalam kota Batavia atas keterlibatan mereka dalam pemberontakan tersebut mengakibatkan Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier menyatakan bahwa semua orang Cina termasuk yang tinggal dalam kota Batavia harus dianggap sebagai

musuh pemerintahan VOC (Hoetink 2007:16):

“Kekoeatiran jang dalem kota aken petjah pembrontakan, telah bikin Gouvernour Generaal Valckenier menanja, bagaimana orang moesti berlakoe apabila terdjadi itoe pembrontakan, dan itoe Gouverneur-Generaal menjataken lebih djaoe, selandjoetnja semoea orang Tionghoa moesti dipandang seperti mosoehnja pemerintah dan teroetama haroes dibersihken kota Betawi dari orang Tionghoa, soepaja bisa melawan moesoeh dari loear”.

Pemikiran Gubernur Jenderal Valckenier ini tentu saja sejalan dengan pemikiran orang Eropa yang mediami kota Batavia. Saat itu muncul ketakutan terhadap keberadaan masyarakat Cina dalam kota yang dianggap bersekongkol dengan pemberontak di luar tembok kota Batavia. Ketakutan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian pada penduduk Tionghoa yang bertempat tinggal di dalam kota Batavia (Hoetink 2007:16):

“Ini pikiran dari itoe Gouvernuer Generaal jang tentoe telah diketahoei djoega oleh pendoedoek europa, tentoe sadja tida bisa bikin ilang itoe orang-orang europa poenja rasa tida slamat, tida bisa koerangken marika poenja kekoeatiran jang orang-orang Tionghoa didalem kota aken lakoeken serangan. Sebaliknja itoe pikiran-pikiran tentoelah membantoe aken membangoenken perasaan bermoesoeh pada pendoedoek Tionghoa”

Pada saat yang bersamaan muncul isu yang menyatakan bahwa orang-orang Cina

akan merencanakan membunuh semua orang non-Cina, memperkosa perempuan-perempuan serta menjadikan mereka dan anak-anaknya budak-budak orang Cina. Banyak orang-orang nonCina yang berkerumun membicarakan isu tersebut dan pada akhirnya menimbulkan kebencian bersama orang-orang nonCina terhadap orang-orang Cina. Para bekas tukang, bahkan budak sekalipun berkerumun menyatukan tekad untuk membunuh musuh mereka bersama yaitu masyarakat Cina Batavia yang dianggap eksklusif. Kebencian yang memuncak terhadap penduduk Cina yang berdiam di dalam kota atas tuduhan bersekongkol melakukan pemberontakan tersebut mengakibatkan pecahnya kerusuhan massal berupa pembantaian terhadap penduduk Cina dalam kota Batavia pada tanggal 8 Oktober 1740 (Benny G. Setiono t.t:112):

“Bagimana pada 9 October dan hari-hari jang berikoetnja, matros-matros dan laen-laen orang dari golongan rendah, antara siapa ada djoega soldadoe-soldadoe, orang-orang preman, orang-orang Boemipoetra, dan boedak-boedak telah lakoeken pemboenoehan besar antara orang-orang Tionghoa, hingga dalem tempo 24 djam sadja kota Betawi soeda disapoe bersih dari orang-orang Tionghoa, bagimana roemah-roemahnja orang tionghoa telah dirampok dan dibakar, bagimana orang-orang Tionghoa jang ada di dalem pendjara diboenoeh dengan sabar dan sampepoen orang-orang tionghoa jang lagi dirawat dalem roemah sakit dibiarken sadja

diboenoeh itoe semoea kekedjaman bisa dibatja dalem laen-laen boekoe”.

Kejadian pembantaian masal tersebut juga terekam dalam harian Selompret Melajoe (1902):

“sekalian roema orang Tjina dibakar miliknja dirampas dan orangnja diboenoeh. Dari kiri kanan marika itoe dikedjar dan dipoekoel di djalan besar seperti andjing. Sambil bersoerak bangsa Oelanda binasakan moesoenja itoe jang tiada sala sesoeatoe apa. Brapa ratoes orang Tjina jang ditawan, soedah dipotong kepalanja seperti binatang. Dalem semoea roema h orang Tjina ada banjak mati. Orang Tjina jang lagi berobat diroemah sakitpoen dikloearkan dari pembaringannja, ia laloe dipenggal batang lehernja. Toea moeda, orang perempoean dan anak-anak tiada satoe dapet ampoen. Maka dalem seketika sadja aer kali soeda penoe dara. Troes tiga hari lamanja rahajat Tjina di Betawi soeda diboenoeh, dlapan hari lamanja dari tanggal 11 hingga 19 October maitnja marika itoe dilempar ke dalem kali Tjiliwoeng, sebagian dimakan boewaja teroes anjoet ke laoet”

Tentara Belanda, para kelasi, tukang, kuli, budak, menyerbu rumah-rumah orang Cina setelah merampok harta bendanya. Mereka membunuh setiap orang Cina yang ditemui, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua-muda bahkan bayi sekalipun dibantai tanpa ampun. Pembakaran terhadap rumah-rumah orang Cina terjadi, banjir darah terjadi dimana-mana, Rawa Bangke (saat ini bernama Rawa Bunga) di Jatinegara merupakan tempat bertumpuknya banyak

bangkai orang Cina. Kali Angke berarti kali atau sungai yang berwarna merah menggambarkan bertumpuknya mayat di sungai yang saat ini bernama Kali Angke. Penamaan Tanah Abang berarti tanah merah merupakan gambaran bertumpuknya mayat-mayat orang Cina di kawasan tersebut (Benny G. Setiono t.t:113).

Pada pukul lima sore pasukan dan tentara laut VOC mengepung dan menembaki perkampungan orang-orang Cina di Daerah Roa Malaka dengan meriam-meriam. Beberapa orang Cina yang terjebak di dalam rumah berusaha lari keluar menyelamatkan diri akan tetapi terpaksa kembali ke reruntuhan puing-puing rumah mereka karena dsambut tembakan oleh para serdadu VOC. Mereka yang mencoba berenang menyelamatkan diri melalui sungai dan kanal kota dibunuh oleh serdadu-serdadu VOC yang telah menantinya dalam perahu-perahu kecil. Sebagian dari masyarakat Cina melakukan bunuh diri dengan melompat ke dalam kobaran api yang membakar rumah mereka. Masyarakat Cina dibantai dimanapun mereka ditemui, mereka yang berada di dalam rumah sakit, dalam penjara, diseret untuk dibantai oleh orang-orang Eropa, orang pribumi, dan kulit hitam (budak-budak) (Benny G. Setiono t.t:116).

Akibat dari pembantaian massal tersebut, setidaknya sepuluh ribu orang

Cina Batavia tewas dan sisanya Masyarakat Cina melarikan diri ke beberapa tempat seperti Jawa Tengah dan Tangerang Banten. Orang-orang Cina yang masih tersisa berjumlah 3.431 (tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) orang di Batavia diharuskan tinggal di sebuah tempat khusus di luar tembok kota dengan maksud agar pemerintah VOC dapat mengawasi secara mudah. Tempat dimana masyarakat Cina tersebut berkumpul saat ini menjadi pusat perdagangan Glodok (Benny G. Setiono t.t:119).

Penutup

Peristiwa pembantaian etnis tersebut memberikan pelajaran yang begitu pahit atas terjadinya hubungan etnik yang terjadi di Indonesia. Hubungan etnis Cina dengan pribumi di Indonesia yang mengalami berbagai pasang-surut di Indonesia tidaklah tiba-tiba terjadi tanpa adanya upaya sistematis melalui berbagai kebijakan dan hukum untuk mengendalikannya. Sebelum masa VOC hubungan antara masyarakat etnis Cina dan Pribumi Jawa berlangsung secara alamiah sejak ratusan tahun. Beragam budaya diantara Cina dan Jawa telah saling melengkapi.

Hubungan inharmonis terjadi akibat warisan VOC masa lalu yang terus dilestarikan oleh anak cucu Bangsa Indonesia hingga kini. Kita perlu menghilangkan berbagai prasangka dan

praduga buruk yang terjadi, pintu dialog telah dibuka sejak masa Reformasi, tetapi perlu ada keterbukaan untuks saling menerima agar hubungan harmoni yang diharapkan terjadi tidak saja berada dalam tataran kebijakan elit di atas. Untuk itulah perlu kita melihat kembali bagaimana hubungan yang sangat harmonis pernah terjadi pada masa sebelum masuknya kolonialisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lohanda, Mona. 2007. "Tragedi Seorang Kapitan Cina", dalam Hoetnik, *Ni Hoe Kong, Kapitein Tiong Hoa di Betawi dalem Tahon 1740*. (Depok: Penerbit Masup).
- Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Penerbit Elkasa, t.t.).
- Blusse, Leonard. 2004. *Persekutuan Aneh, Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*, (Jogjakarta: Penerbit LKiS).
- Brousson, Clockener. 2007. *Batavia Awal Abad 20*, (Depok: Penerbit Masup).
- Hoetink, B. 2007. *Ni Hoe Kong, Kapitein TIONG HOA di Betawi dalem tahon 1740*, (Depok: Penerbit Masup).
- Lohanda, Mona. 2007. "Tragedi Seorang Kapitan Cina", dalam Hoetnik, *Ni Hoe Kong, Kapitein Tiong Hoa di Betawi dalem Tahon 1740*. (Depok: Penerbit Masup).
- Lohanda, Mona. 2007. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. (Jakarta: Komunitas Bambu).
- "Perkara boenoe di taon 1740", *Selomporet Melajoe*, 20 Nopember 1902
- Shahab, Alwi, 2002. *Betawi Queen of The East*, (Jakarta: Penerbit Republika).